

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, tujuan pembangunan Kabupaten Solok Selatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Solok Selatan sehingga mampu mandiri, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mempertahankan hidupnya di era teknologi informasi dan persaingan global.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan terarah sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasilguna dan berdayaguna.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, usulan hasil Musrenbang Kecamatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial) serta berpedoman kepada Renstra SKPD yang merupakan perencanaan SKPD untuk periode 5

Tahun (2016-2021) dan merupakan penjabaran teknis operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2016-2021. Sementara RPJMD sendiri merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan dan program Bupati dan wakil bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Solok Selatan dan RPJM Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari untuk Tahun Anggaran 2018.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [SPPN] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 7. Kepmensos RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2010-2015;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
 12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan rencana kerja SKPD ini adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi pelaksana pembangunan dilingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENJA adalah :

1. Sebagai alat untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang sosial pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari

3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD

1.4 SISTEMATIK PENULISAN

Sitematika Penulisan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---|
| BAB. I | Pendahuluan
Memuat Tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan dan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2018. |
| BAB. II | Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra 2016-2021, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan. |
| BAB. III | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran program dan kegiatan tahun 2018. |
| BAB. IV | Penutup
Bab ini memuat uraian penutup, lampiran rencana strategis dan rencana kinerja Tahun 2018. |

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah membantu Kepala Daerah di bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dinas Sosial Masyarakat dan Desa/Nagari ditujukan untuk mendukung tercapainya target SPM bidang sosial, Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan visi misi kepala daerah Kabupaten Solok Selatan terpilih 2016-2021.

Pada Renja Tahun 2016 Terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

BIDANG SOSIAL

1. Pemberantasan Kemiskinan melalui bantuan usaha ekonomis produktif dan bahan bangunan rumah
2. Pembinaan lanjutan bagi KUBE fakir Miskin yang telah mendapat bantuan
3. Operasional Program Keluarga Harapan
4. Peningkatan Kualitas pelayanan dan sarana rehabilitasi kessos bagi PMKS
5. Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

6. Pembinaan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
7. Pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi kessos bagi orang dengan kecacatan berat
8. Peningkatan Kualitas LKKS

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pemanfaatan Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari
2. Fasilitasi Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
3. Fasilitasi Keberlanjutan PAMSIMAS
4. Pelatihan Pengurus LPMN dan KPM
5. Pekan Inovasi Desa/Nagari dan Gelar Peningkatan, Penerapan, Pemanfaatan Pemberdayaan Dana Nagari dalam Pembangunan Nagari
6. Fasilitasi Pemberdayaan Dana Nagari dalam Pembangunan Nagari
7. Monitoring dan Evaluasi Kredit Mikro Nagari
8. Pembinaan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif Pola Revolving
9. Bulan Bakti Gotong Royong
10. Lomba Nagari Berprestasi
11. Pembinaan Lembaga Adat Nagari
12. Penyusunan Profil Nagari
13. Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
14. Pelaksanaan Jambore Pemberdayaan Masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sosial, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan sosial yang belum tuntas diantaranya masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan, masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tak layak huni, masih banyaknya penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, remaja putus sekolah dan potensi bencana alam masih menjadi permasalahan sosial yang harus menjadi perhatian hingga saat ini.

Pada Bidang pemberdayaan masyarakat kelembagaan ekonomi yang belum berfungsi, keterbatasan modal usaha karena kesulitan dalam mengakses dunia perbankan, sempitnya ruang pemasaran yang diakibatkan oleh minimnya infrastruktur yang mengakses daerah tersebut, masih rendahnya kualitas produk sehingga tidak bisa berkompetisi secara maksimal serta masih rendahnya kemampuan wirausaha dan penggunaan teknologi tepat guna masih menjadi persoalan hingga saat ini.

Begitupula pada bidang pemerintahan nagari, belum optimalnya kinerja aparaturnya pemerintahan desa, belum tergalinya sumberdaya desa, belum optimalnya kemandirian desa dalam menjalankan roda pemerintahan, masih rendahnya sumberdaya tenaga pengelola administrasi desa masih menjadi hal yang harus terus ditingkatkan hingga saat ini sehingga kemandirian nagari dan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas sebagai visi yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa betul-betul dapat diwujudkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/HUK/2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten bahwasanya penerapan oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan Perseorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya sosialnya secara wajar.

Kondisi Pelayanan Bidang Sosial saat ini adalah :

- Masih tingginya angka kemiskinan sehingga meskipun dari tahun ketahun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan derajat sosial masyarakat miskin baik melalui dana APBD maupun danan APBN (Dekosentrasi) namun masih belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Solok Selatan.

- Belum memadainya Sarana dan Prasarana pelayanan Kessos luar dan dalam panti.

Saat ini baru ada 1 panti sosial anak yang ada di Kabupaten Solok Selatan dan telah memiliki SIOP Panti.

- Masih kurangnya Jaminan sosial bagi penyandang cacat berat tidak potensial yang bersumber dari dana APBD.
- Masih belum sebandingnya angka masyarakat yang tinggal di rumah tak layak huni dengan program kegiatan untuk penyelesaian masalah tersebut dilakukan selama ini.

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sedangkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- Belum berfungsinya kelembagaan ekonomi secara optimal seperti koperasi unit desa, kelompok-kelompok usaha dan lain-lain. Bahkan di beberapa daerah.desa tertentu lembaga-lembaga ekonomi tersebut nyasris belum ada.
- Keterbatasan Modal usaha karena kesulitan mengakses dunia perbankan.
- Sempitnya ruang pemasaran yang disebabkan oleh masih minimnya infrastruktur untuk mengakses daerah tersebut.
- Masih rendahnya kualitas produk sehingga tidak bisa berkompetisi secara maksimal
- Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan wirausaha dan penggunaan teknologi tepat guna

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Di Bidang Pemerintahan Desa masih ada persoalan-persoalan yang ada yaitu :

- Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintahan desa seperti pemahaman tugas pokok dan fungsi kepala desa/ perangkat desa dan BPD.
- Belum tergalinya sumber daya desa secara optimal yang disebabkan oleh masih lemahnya produk hukum desa, APBDes, Perdes dan sejenisnya.
- Belum optimalnya kemandirian desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat sebagai salah satu contoh masih ada beberapa desa yang belum memiliki kantor desa dan aparat/perangkat struktur desa yang lengkap.
- Masih rendahnya sumberdaya tenaga pengelola administrasi desa yang tercermin dari masih rendahnya tingkat pendidikan kepala desa dan sekretaris desa yang masih mayoritas lulusan SLTA bahkan SLTP.

2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI

Jika dilihat dan ditarik garis besar dari keterangan diatas, secara garis besar faktor internal dan eksternal dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalah sebagai berikut :

A. Kekuatan (Streght)

- Adanya Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai aturan pelaksanaan Permen Sosial.
- Adanya dukungan Dana dari APBD Provinsi dan APBN (Dekonsentrasi dan).
- Adanya Komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan sampai dengan staf dalam mengatasi masalah sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

- Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang jelas.

B. Kelemahan (weakness)

- Kualitas sumberdaya manusia pemberdayaan yang terbatas
- Sarana dan Prasarana Penunjang belum memadai
- Kesempatan diklat yang terbatas
- Koordinasi belum optimal
- Kurangnya besaran dana untuk mendukung pencapaian target SPM melalui dana APBD untuk bidang sosial

C. Peluang (Opprtunities)

- Visi misi Kabupaten Solok Selatan
- Komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif dalam pembangunan Bidang sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Tersedianya lembaga-lembaga pelatihan
- Terbentuknya pemerintahan nagarindan penyerahan sebagian urusan ke nagari
- Dukungan dari lembaga-lembaga/stakeholder terkait.
- Adanya potensi dalam Pembangunan kesejahteraan sosial seperti : ORSOS, perusahaan-perusahaan melalui dana CSR dan lembaga sosial lainnya yaitu LKKS, BAZNAS, WKSBM, Karang Taruna dll.

D. Tantangan

- Kondisi ekonomi, politik dan stabilitas keamanan yang penuh ketidak pastian.
- Tuntutan reformasi dan Good Governance.
- Kemajuan dan terjadinya era globalisasi dalam berbagai bidang (IPTEK, Industri, Komunikasi dan Informasi).
- Intensitas pembangunan yang semakin meningkat.

- Perubahan paradigma perencanaan pembangunan.
- Peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan nagari masih rendah

E. Faktor Penentu Keberhasilan

Untuk memacu pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Solok Selatan khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan diantaranya :

- Peningkatan profesionalisme aparat dalam menjalankan tugas dan kegiatan.
- Adanya sistem informasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Nagari yang handal yang menghasilkan pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan mulai dari data, informasi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas serta responsibilitas.
- Tersedianya sumberdaya manusia yang profesional dengan sistem pengembangan karir berdasarkan merit system.
- Adanya komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- Adanya produk/jasa unggulan yang menjadikan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagai institusi sosial pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang berorientasi pada perbaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Solok Selatan.
- Adanya Komitmen dari seluruh pegawai maupun pimpinan dan masyarakat akan perlunya perbaikan kondisi hidup masyarakat yang berorientasi pada keberhasilan mengangkat taraf hidup masyarakat.
- Adanya Standar dan Prosedur yang tetap untuk program-program sosial pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal program/kegiatan yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari untuk Tahun Anggaran 2018, namun dengan adanya usulan pemangku kepentingan (Masyarakat) maka usulan tersebut telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas untuk memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat, pencapaian target Renstra SKPD 2016-2021 dan pencapaian target SPM bidang Sosial.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memperhatikan usulan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Tahun 2017 terdapat beberapa program / kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Yaitu :

- a. Kegiatan Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi masyarakat yang tinggal dirumah tak layak huni.
- b. Fasilitasi Pembinaan Aparatur Nagari
- c. Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
- d. Pelatihan Kemandirian Penyandang Disabilitas Penyandang Masalah Sosial (Gila)
- e. Pelatihan Kader Posyandu
- f. Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna Nagari
- g. Bantuan Beasiswa Anak RTSM dan Anak Berprestasi
- h. Pelatihan Kader Pemberdayaan dan Kader Teknis Nagari

Semua usulan program dan kegiatan diatas terdapat usulan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan juga RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 namun ada beberapa usulan yang tidak sejalan dengan tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Usulan-usulan yang mendukung pelaksanaan tugas dan pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari adalah :

- Kegiatan Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi masyarakat yang tinggal dirumah tak layak huni.
- Fasilitasi Pembinaan Aparatur Nagari
- Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna Nagari

Sedangkan usulan-usulan berikut :

- Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
- Pelatihan Kemandirian Penyandang Disabilitas Penyandang Masalah Sosial (Gila)
- Pelatihan Kader Posyandu
- Bantuan Beasiswa Anak RTSM dan Anak Berprestasi
- Pelatihan Kader Pemberdayaan dan Kader Teknis Nagari

Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dapat diusulkan ke instansi terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dalam Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran menjadi salah satu prioritas pembangunan ditingkat pusat maupun daerah pada periode lima tahun yang akan datang.

Begitu pula pada target nasional yang telah ditetapkan untuk bidang sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/HUK/2008 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten bahwasanya penerapan oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Ada 4 jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan dengan 7 indikator :

- Persentase (%) PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (80%).
- Persentase (%) PMKS skala Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (80 %).
- Persentase (%) panti sosial skala Kab/Kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (80 %)
- Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (60 %)
- Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (80 %)

- Persentase (%) korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (80 %)
- Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (40 %)

A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

• TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Mengevaluasi kinerja pembangunan tahun 2016 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2018 dengan melihat kondisi kekinian dibidang sosial tenaga kerja dan transigrasi.
- Mengarahkan pencapaian visi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan tahun 2018.
- Menyusun kebijakan pembangunan bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang dituangkan dalam susunan program dan indikasi kegiatan tahun 2018 dengan melihat keterkaitan dengan visi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Solok selatan dan Visi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari seluruh sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya pembangunan.

• SASARAN

Adapun sasaran kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan anggaran adalah sebagai berikut ;

- Menurunnya Beban Biaya Hidup Rumah Tangga Miskin
- Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Lembaga dalam Bidang Ekonomi
- Meningkatnya Kemampuan Aparatur yang Dibutuhkan dalam Tata Cara Pramu Pimpinan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Nagari

**Tabel 1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Tahun Anggaran 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	
1. Menurunnya Beban Biaya Hidup Rumah Tangga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Tenaga Pendamping Sosial • Rata-Rata Rumah tangga Miskin yang mendapatkan Bantuan Bedah Rumah • Terlaksananya Pelatihan bagi Pendamping Sosial • Terlaksananya Pendampingan Manajemen Usaha bagi KUBE FM yang telah mendapat Bantuan • Tersedianya Sarana Prasarana Perumahan bagi Rumah Tangga Miskin
Tujuan 2 : Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PMKS	
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase PMKS yang Mendapat Bantuan Sosial • Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan dan Bantuan Sosial • Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Orang dengan Disabilitas Berat • Jumlah PMKS yang Mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Orang dengan Lanjut Usia Terlantar • Terlaksananya Verifikasi/Validasi Data Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan • Persentase Penanganan Korban Bencana Sosial dan Korban Bencana Sosial • Tersedianya Data PMKS • Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dan Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PMKS
Tujuan 3 : Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial	

	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Berpartisipasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat • Terfasilitasinya Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Basnaz dan LK3) • Meningkatnya Peran serta ORSOS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (LKKS)
Tujuan 4 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan	
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rata-rata Alokasi Dana Desa • Perbandingan Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan dan Dihasilkan • Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BP-SPAM) • Jumlah Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) • Terfasilitasinya Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata • Jumlah Laokasi PAMSIMAS yang Difasilitasi • Terlaksananya LPMN dan KPM • Terlaksananya Fasilitas Asosiasi DPD LPMN • Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi di Nagari • Terlaksananya Pemilihan KAN Terbaik • Terlaksananya Pelatihan Adat dan Pemantapan ABS SBK bagi Penurus LKAAM, KAN dan Bundo Kandung
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Lembaga dalam Bidang Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • % KJKS Aktif • % Kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Aktif • % Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari • Terlaksananya Pembinaan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif Pola Revolving • Terlaksananya Pembinaan Kredit Mikro Nagari (KJKS) • Terbentuknya BUMNag ditiap Nagari
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • % Dana Nagari yang digunakan dengan Pola Revolving • Terlaksananya Peringatan Bulan Bakti

	<p>Gotong Royong</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Nagari yang Mendapat Pendampingan, Perencanaan dan Penyaluran dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Nagari • Terlaksannya Jambore KPM
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	
<p>Meningkatnya Kemampuan Aparatur yang Dibutuhkan dalam Tata Cara Pramu Pimpinan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Nagari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • % Aparatur Nagari Yang Memperoleh Pelatihan Sesuai dengan Tupoksi • Jumlah Aparatur Nagari Yang Berprestasi • Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pengelola Keuangan Nagari • Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemerintahan Nagari • Wali Nagari Berprestasi Tingkat Nagari • Sekretaris Nagari Berprestasi • % Nagari yang Menyusun APB Tepat Waktu • % Nagari yang Menyusun Laporan Keuangan Tepat Waktu • Terlaksananya Evaluasi Produk Perna APB Nagari • Tersusunya Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari • Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Nagari • Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Asset Nagari • Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerinyahan Nagari • Menjadi Nagari Terbaik Tingkat Propinsi • % Terlaksananya Profil Nagari Berbasis Komputer • Terlaksananya Fasilitasi Rapat-Rapat Koordinasi pemerintahan Nagarai dengan Pemda • Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penataan Nagari dan Jorong/Pemekaran Nagari dan Jorong.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Namun untuk menjembatani penjabaran dari sasaran konsep ke tataran praktis, maka dibutuhkan suatu kebijakan. Suatu Kebijakan akan efektif apabila dapat menjadi acuan atau payung terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang sejenis yang dalam penyusunan renja ini disesuaikan dengan nomenklatur fungsi/sub fungsi, program/kegiatan pemerintah pusat.

Adapun Program Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 3 Berikut ini :

Tabel 3 : Program dan Kegiatan Tahun 2018

PROGRAM	KEGIATAN
Tujuan 1 : Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberantasan kemiskinan melalui bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bahan Bangunan Rumah (BBR)2. Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin3. Operasional Program Keluarga Harapan
Tujuan 2 : Meningkatnya Pelayanan Sosial bagi PMKS	
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas pelayanan dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS2. Penanganan masalah yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa3. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial
Tujuan 3. Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial2. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Tujuan 4 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan	

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pemanfaatan sarjana pemberdayaan masyarakat nagari (SPMN) 2. Fasilitasi mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) 3. Fasilitasi keberlanjutan PAMSIMAS 4. Pembinaan LPMN dan KPM 5. Pekan inovasi desa/nagari dan gelar peningkatan, penerapan, pemanfaatan sentuhan teknologi tepat guna (TTG) 6. Penilaian KAN Terbaik 7. Pelatihan Adat dan Pemantapan ABS SBK Bagi Pengurus LKAAM, KAN dan Bundo Kandung
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan usaha ekonomi produktif 2. Pembinaan kredit mikro nagari (KJKS) 3. Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan bhakti gotong royong (BBGR) 2. Fasilitasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) 3. Jambore KPM
Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa Dana Sharing Kegiatan Kompensasi LU II Eks UPT Dusun Tengah 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 3. Penilaian Kompetensi Aparatur Nagari
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Nagari 2. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Nagari 3. Kegiatan Pembinaan Keuangan Nagari
Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Nagari 2. Evaluasi Perkembangan Nagari (Nagari Berprestasi) 3. Fasilitasi Penyusunan Profil nagari 4. Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari dengan Pemerintahan Daerah 5. Fasilitasi Penataan Nagari dan Jorong/Pemekaran Nagari dan Jorong.

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 9 Program dengan 34 Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2018. Semua kegiatan tersebut disusun dalam rangka pencapaian target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan, pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang pada akhirnya mewujudkan visi dan misi kepala daerah pada bidang sosial pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2018.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 akan sangat bergantung pada besarnya komitmen penyelenggara pemerintah dan peran aktif masyarakat. Harapan dari disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan adalah agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pembangunan bidang sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari bagi aparaturnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

**KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**BASRIAL, SE
NIP. 19630910 198603 1005**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SOLOK SELATAN**



